

SKRIPSI

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPATIF
DI KELURAHAN MARIO PULANA KECAMATAN CAMBA
KABUPATEN MAROS**



Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11056 17

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPATIF
DI KELURAHAN MARIO PULANA KECAMATAN CAMBA
KABUPATEN MAROS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

YUNIARTI M. RIDWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11056 17

Kepada

04/09/2021

exp
Smb. Alumni

R/0122/ADN/21 CD
RID
P'

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif
Di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa
Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa : Yuniarti M. Ridwan
Nomor Induk Mahasiswa : 105611105617
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021.

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 720727

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Muhammad Yahya, M.Si
3. Muh. Amin Umar, S.Pdi., M.Pdi
4. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yuniarti M. Ridwan
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11056 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Yuniarti M. Ridwan

ABSTRAK

Yuniarti M. Ridwan, Fatmawati dan Samsir Rahim. 2021. Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Perencanaan pembangunan berbasis partisipatif merupakan perencanaan melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 (sebelas) orang yang ditentukan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, yaitu: 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat, bahwa proses identifikasi masalah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yaitu kegiatan rapat koordinasi belum berjalan dengan efektif, karena kegiatan sering tidak dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan. Tetapi semua aspirasi masyarakat dapat ditampung dan didengarkan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan, 2) Partisipatoris, bahwa masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif serta bantuan tenaga/materil yang diberikan masyarakat bersifat sukarela. Tetapi hanya sebagian masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, dan 3) Sinergitas, bahwa kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan sudah cukup efektif dan efisien dengan melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas, menyepakati tim delegasi dan anggaran setiap kegiatan yang diusulkan. Tetapi usulan yang diajukan ke tingkat Kecamatan belum bisa terkamodir sepenuhnya karena banyaknya usulan dari Kelurahan atau desa lain.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Partisipatif

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros”*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis ke depan.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Kepala Kelurahan beserta seluruh Staff Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teman seperjuangan Kelas IAN B Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2017

yang selama ini di bangku perkuliahan telah memberikan kebahagiaan, motivasi, pelajaran serta masukan kepada penulis. Semoga Allah meridhoi langkah kita semua menuju kesuksesan.

9. Teman-teman seperjuanganku yang terheboh (Andika Planggu Putri, Wahyuni Irwan dan Sriwahyuni Permatasari) terimakasih atas kebersamaan dan bantuannya selama perkuliahan, semoga kita bisa sukses di masa yang akan datang.
10. Untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang dan sabar melewati suka duka. Tetap lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 9 Agustus 2021

Yuniarti M. Kidwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Perencanaan	10
C. Konsep Pembangunan	16
D. Konsep Partisipatif	21
E. Perencanaan Pembangunan Partisipatif	23
F. Kerangka Pikir	28
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Fokus	30
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengabsahan Data	37
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN..... 94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian	35
Tabel 4.1 Sarana Ibadah di Kelurahan Mario Pulana	41
Tabel 4.2 Daftar Masalah Musrenbang Kelurahan 2021	53
Tabel 4.3 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Mario Pulana 2021.....	60
Tabel 4.4 Daftar Usulan Pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Tahun 2021	63
Tabel 4.5 Daftar Pemberi Sumbangan Pembangunan Musholla.....	65
Tabel 4. 6 Hibah Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Tani	65
Tabel 4.7 Tim Delegasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Mario Pulana	40
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Mario Pulana	49
Gambar 4.3 Proses Proses identifikasi Masalah Musrenbang	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang disadari dan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan bermakna, dengan tujuan mencapai kemajuan sosial dan material termasuk bertambah besarnya keadilan dan kebebasan untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka dapatkan terhadap lingkungan mereka.

Dalam rangka membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat yang tinggi, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ialah suatu kesatuan prosedur perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, banyak aspek atau hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Terutama pada tahap perencanaan yang merupakan tahap yang paling penting dari proses pembangunan, karena perencanaanlah yang sangat menentukan

berhasil tidaknya pembangunan. Berdasarkan asumsi para ahli pembangunan, semakin tinggi perhatian atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, maka akan memberikan hasil yang lebih optimal.

Proses perencanaan pembangunan yang awalnya *top-down*, dan merupakan urusan pemerintah pusat dan daerah, kini juga melibatkan masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dianggap sebagai cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Perencanaan partisipatif yang disusun oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimana dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Partisipatif dalam perencanaan pembangunan nasional akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan teruji kemampuannya sebagai pengguna dan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan melalui partisipatif menggambarkan salah satu upaya pengembangan potensi masyarakat untuk mempersiapkan pembangunan terkait dengan kapasitas sumber daya lokal yaitu mencapai kemajuan yang diinginkan dalam bentuk keutuhan yang ada dalam masyarakat, seta kemajuan dukungan dan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan partisipatif bertujuan supaya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya untuk menanggapi kebutuhan serta kemauan masyarakat maka proses perencanaan pembangunan wajib mengikutsertakan masyarakat. Semenjak dikenalkan perencanaan pembangunan partisipatif, sebutan *stakeholder* jadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai keistimewaan dalam model partisipatif. Perencanaan pembangunan berkonsep partisipatif berawal dari kepercayaan keberhasilan program-program yang ditetapkan oleh seluruh komitmen *stakeholder*, sehingga bisa diketahui sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan suatu pembangunan.

Karakteristik perencanaan pembangunan partisipatif dikenal dengan adanya yaitu: 1) penyelidikan dalam perencanaan pembangunan, 2) proses perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilaksanakan melalui forum musyawarah dengan melibatkan para seluruh unsur pelaku di wilayah setempat, 3) daya dukung yang kuat untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan, 4) perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kenyataan yang terjadi di suatu daerah, dan 5) merancang anggaran agar bias diketahui berapa biaya yang akan dibutuhkan dan digunakan (Kartikawanto, 2013).

Walaupun sulit dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, seluruh masyarakat mungkin tidak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, tetapi dalam hal apapun, pemerintah harus melibatkan masyarakat ketika merumuskan kebijakan yang melibatkan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan alat yang ampuh untuk menentukan arah

kebijakan pembangunan ke depan. Partisipasi ini akan berdampak positif terhadap keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan karena dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian Ivanna (2018) dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, masyarakat cenderung merasa asing hal ini terjadi karena peran aparat pemerintahan yang kurang optimal. Ikut sertanya masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan masih menjadi hal yang awam bagi masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan masyarakat enggan melibatkan diri. Dalam kenyataannya juga, tidak seluruh aparat dalam bidang pembangunan turut berpartisipasi melaksanakan tugasnya. Seperti sedikitnya penyampaian informasi yang diberikan oleh aparat pemerintahan sampai timbul keacuhan oleh masyarakat. Perihal ini jadi alasan masyarakat untuk tidak ikut dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang dibangun oleh Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam membangun Kelurahan Mario Pulana dengan melibatkan partisipasi masyarakat, merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Namun terdapat permasalahan mengenai proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Mario Pulana, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti proses perumusan masalah melalui kegiatan identifikasi masalah di tingkat lingkungan Kelurahan jarang dilakukan, sehingga menghambat penemuan masalah terkait kebutuhan masyarakat di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba. Minimnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, hal ini sesuai

pada daftar kehadiran yang ada masyarakat yang hadir hanya 9 orang. Padahal dengan kehadiran masyarakat ini sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, karena merekalah mengetahui permasalahan yang dihadapi.

Hasil wawancara pada 24 April 2021 dengan Kepala Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana yang membuat kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat berasumsi kalau proses pengambilan keputusan saat musyawarah ialah tugas pemerintah bukan tugas masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu banyak ikut campur dalam musyawarah tersebut. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu rata-rata mata pencarian masyarakat Kelurahan Mario Pulana sebagai petani yang membuat mereka tidak sempat ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **“Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam

penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis yaitu diharapkan ini sebagai bahan masukan kepada Kantor Kelurahan Mario Pulana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Manfaat Akademik
 - a. Diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana perencanaan pembangunan berbasis partisipatif.
 - b. Sebagai bahan rujukan terhadap para peneliti lain yang berfokuskan penelitian dengan masalah yang sama tentang perencanaan pembangunan berbasis partisipatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan penelitian atau sebagai acuan analisis perbedaan untuk menganalisa perbedaan atau persamaan dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada table penelitian terdahulu di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Manghayu (2018)	Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E- Musrenbang	Metode Kualitatif	Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan E- Musrenbang sudah cukup banyak daerah yang menerapkannya dalam rangka melaksanakan kegiatan	Berfokus kepada perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerepan E- Musrenbang.

				pemerintahan dalam bentuk komitmen untuk mewujudkan transparansi dan	
2.	Prakoso & Subowo (2018)	Proses Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Metode Penelitian Kualitatif	Pada proses perencanaan pembangunan partisipatif dengan Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tembalang Kota Sema telah berjalan dengan baik, apa yang hendak dicapai dan siapa saja yang bertanggungjawab akan kegiatan dan program	Penelitian ini dilakukan di tingkat Kecamatan.

				telah dilaksanakan akan tetapi baik itu kapan kegiatan dan program diselesaikan tidak dibahas pada Musrenbang Kecamatan Tembalang.	
3.	Harjo (2017)	Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Gutan Rakyat di Kabupaten Jombang	Metode penelitian Kualitatif	Perencanaan partisipatif dalam pembangunan kehutanan pada hutan rakyat di Kabupaten Jombang pada tahapan musyawarah ditingkat RT dan	Penelitian ini menggunakan 5 indikator yaitu penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, dan

				pertemuan kelompok tani sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan.	menentukan anggaran.
--	--	--	--	--	----------------------

B. Konsep Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Dalam bahasa Inggris, perencanaan disebut dengan "*Planning*" yang mempunyai arti kegiatan yang dilakukan saat ini untuk menentukan masa depan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, suatu perencanaan harus dibuat dengan baik. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya kerangka atau rancangan dari sesuatu yang akan dikerjakan. Dalam arti yang sederhana perencanaan dapat digambarkan sebagai proses mempersiapkan sesuatu yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan adalah proses yang berkesinambungan yang meliputi bagian-bagian dari formulasi perencanaan dan implementasinya. Perencanaan bisa dilakukan untuk meninjau jalannya aktivitas, karena sifat perencanaan ialah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan (Listyangish, 2014). Perencanaan tersebut dijalankan oleh semua orang dan dari setiap diri manusia untuk melaksanakan pengambilan keputusan

sampai dalam implementasi kegiatan. Perencanaan dilaksanakan oleh manusia untuk dirinya sendiri, keluarga, komunitas, masyarakatnya, lingkungan dan tempat tinggalnya untuk tujuan agar bias bertahan hidup seefisien mungkin.

Menurut Wrihatnolo & Nugroho (2006) perencanaan adalah keseluruhan proses berpikir dan cermat menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di masa depan. Perencanaan ialah proses atau kegiatan dalam rangka mempersiapkan rencana kegiatan.

Asroha (2010) mendefinisikan bahwa perencanaan mempunyai tiga makna yaitu *Pertama*, perencanaan ialah upaya untuk menemukan wujud yang bakal datang dan berusaha untuk mewujudkannya. *Kedua*, perencanaan berarti upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara situasi saat ini dan situasi masa depan. *Ketiga*, perencanaan ialah upaya mengubah situasi supaya dapat sejalan dengan perubahan kondisi lingkungan.

Menurut Nadlir (2013) perencanaan merupakan upaya untuk memilih dan mengaitkan sesuatu dengan kebutuhan di masa depan dan upaya untuk mencapainya. Meskipun perencanaan memiliki arti penting di masa depan, tetapi bukanlah sesuatu yang dibuat tidak dipertimbangkan dengan serius. Dalam metode perencanaan selalu didasarkan pada data dan estimasi yang telah dicapai, serta memperhitungkan juga sumber daya yang ada dan dapat dikumpulkan.

Oleh karena itu, perencanaan merupakan dasar dan tolak ukur dalam menentukan rencana selanjutnya.

Perencanaan adalah kebijakan yang dijabarkan berdasarkan tindakan yang bermodel logis dari ilmu manajemen, kepemimpinan, administrasi, kebijakan publik, komunikasi dan teknologi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan adalah arah yang harus dicapai agar rencana dapat dirumuskan dan ditentukan dengan baik, sehingga tujuan perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan yang jelas dan terukur. Dengan tujuan yang jelas ada target yang harus diraih, kemudian dari target itulah selanjutnya menjadi fokus untuk menentukan langkah selanjutnya.

Perencanaan merupakan cara untuk memprediksi dan menyeimbangkan perubahan. Perubahan terjadi setiap saat dan ini perlu diharapkan untuk menjaga keseimbangan perubahan. Sanjaya (2013:23) menjelaskan perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang perlu dicapai menggunakan analisis kebutuhan dan dokumen yang lengkap, kemudian menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Saat merencanakan, pola pikir menunjuk bagaimana mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien.

Menurut Dolong (2016) perencanaan ialah proses yang terpadu dan dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Mengapa disebut terpadu, karena direncanakan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan Seknun (2014)

mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan dan memanfaatkan sumber daya secara sistematis, yang diinginkan agar dapat mendukung kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, pada hakikatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia. Sebuah rencana yang bagus bisa didapatkan melalui pertimbangan kondisi di masa yang akan datang dalam perencanaan sesuatu yang diputuskan akan dilaksanakan dan kondisi sekarang pada saat rencana dibuat.

Menurut Sari (2016) perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Majid (2015) mendefinisikan perencanaan merupakan permulaan dari seluruh proses yang masuk akal dan menyimpan sifat optimisme yang berdasarkan atas keyakinan bahwa akan bias menangani segala macam permasalahan. Perencanaan juga ialah menentukan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang akan diselesaikan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

2. Manfaat Perencanaan

Perencanaan dilakukan terus menerus dan merupakan aktivitas yang tidak akan pernah selesai. Semua rencana yang bersifat sementara dan diganti apabila ada fakta atau variabel-variabelnya perlu dinilai ulang. Rencana ini biasanya ditinjau secara teratur dan perubahan dibuat segera bila diperlukan untuk menghadapi situasi baru. Handoko (2012) berpendapat bahwa manfaat dalam perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menunjang manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan,
 - b. Memungkinkan manajer untuk memiliki pemahaman tentang seluruh gambaran operasi yang lebih jelas,
 - c. Membantu menetapkan tanggungjawab yang lebih berat,
 - d. Menyediakan sarana bagi pemerintah untuk beroperasi,
 - e. Membuat koordinasi antara berbagai organisasi menjadi lebih mudah,
 - f. Membuat tujuan lebih spesifik, rinci, dan mudah dimengerti.
3. **Kompenen-Kompenen Perencanaan**

Suatu perencanaan tidak lain adalah penyusunan (pembuatan) sistematis dari langkah-langkah (tindakan) yang akan dilakukan di masa ke depan, berdasarkan pertimbangan cermat terhadap potensi, faktor eksternal serta aspek terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Permatasari (2017) ada lima komponen-komponen perencanaan yaitu:

- a. Penjelasan misi dan tujuan yang diuraikan oleh pimpinan (eksekutif) manajemen dan memfokuskan pada pemikiran strategis yang berkembang bersama dengan tujuan masa depan,
- b. Melakukan analisis lingkungan dengan mencari dan mengevaluasi serta memprediksi faktor dan kondisi eksternal yang harus diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi,
- c. Menyelidiki kondisi dan sumber daya internal dengan menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat menjadi

pertimbangan dalam menyusun perencanaan strategis,

d. Memformulasikan, menilai, dan memilih strategis,

e. Menerapkan dan mengamati rencana strategis.

4. Tahapan-tahapan Perencanaan

Pada prinsipnya, perencanaan berputar pada dua hal yakni pertama, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dan secara sadar menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kedua, pilih antar alternative yang efektif dan masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut. Karyoto (2016) mengemukakan terdapat lima tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat melakukan perencanaan yakni:

a. Identifikasi dan perumusan masalah

Identifikasi ialah mendeskripsikan atau menjelaskan dari berbagai elemen dalam suatu objek tertentu. Variabel-variabel ini perlu di jelaskan satu per satu, karena dapat menimbulkan masalah atau mempengaruhi objek. Rumusan masalah ialah meringkas beberapa variable yang dianggap mempengaruhi keberadaan objek yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

b. Pengumpulan data

Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan atau menyusun data yang dibutuhkan untuk mendukung realisasi keinginan di masa depan.

c. Melakukan analisa data

Dalam analisis data diperlukan prediksi yang akurat seperti ekonomi, sosial, politik, kebijakan pemerintah, pekerja, konsumen, dan pesaing di masa depan. Jika memiliki informasi ini, organisasi akan lebih mudah memprediksi situasinya sendiri di masa mendatang.

d. Penetapan sasaran

Sasaran ialah objek yang ditetapkan organisasi untuk dicapai. Untuk menetapkan sasaran, organisasi harus menggunakan beberapa variable yang dijelaskan dalam kegiatan identifikasi masalah. Karena terdapat banyak variabel maka organisasi perlu memilih variabel yang dianggap paling penting untuk mencapai sasaran.

e. Penetapan strategi

Strategi ialah cara yang bisa dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi waktu, pekerjaan-pekerjaan yang dapat diterapkan pada struktur program kerja seperti program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang.

C. Konsep Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya siuman, sadar, bangkit, berdiri dan bentuk. Dalam kata kerja “bangun” berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga dapat dikatakan pembangunan meliputi bentuk, kehidupan dan perilaku. Pembangunan merupakan upaya untuk terus menciptakan kondisi yang dapat

memberikan lebih banyak pilihan atau alternative yang sah bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keinginannya yang paling humanistik. Pembangunan sudah mempunyai makna yang sangat meluas dan membawa banyak harapan namun juga menimbulkan perdebatan yang tiada henti di kalangan masyarakat terutama pakar pembangunan. Tetapi di balik itu pembangunan memiliki nilai positif yang diletakkan padanya.

Pembangunan ialah suatu perubahan sosial, memperkenalkan konsep baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan standar hidup melalui metode yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga negara serta percepatan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pengangguran dan penghapusan kemiskinan absolut.

Menurut Digdowiseiso (2019) pembangunan adalah suatu usaha untuk melangsungkan perubahan agar menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud yaitu bergerak ke arah peningkatan dari situasi semula, tidak sedikit pula yang memperkirakan bahwa pembangunan ialah juga pertumbuhan. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan mendorong terjadinya pengelompokan penduduk atau kegiatan ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah dan kelompok penduduk. Sehingga meningkatnya permintaan akan sumber daya alam dan terjadinya pengelompokan penduduk yang disebabkan oleh kegiatan

ekonomi, maka diprediksi akan terjadi konflik pemanfaatan ruang.

Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjabarkan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial (*economic growth plus social change*). Menurut Anggara & Sumantri (2016) pembangunan ialah proses perubahan yang meliputi semua sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan negara, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Menurut Sudarmanto & Revida (2020) pembangunan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang tidak pernah berhenti dan terus menerus untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka tercapainya perbaikan kualitas hidup dalam lingkungan kehidupan yang juga mengalami perubahan. Sedangkan Gunena (2013) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya atau susunan usaha pertumbuhan serta transformasi yang secara sadar direncanakan dan dilaksanakan oleh negara, bangsa, pemerintah untuk menuju ke arah modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa.

2. Ide Pokok Pembangunan

Pembangunan sebagai serangkaian upaya terencana dan sadar untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan Negara menuju modernisasi dalam kerangka pembinaan bangsa (*nation building*). Siagian (2018) menuturkan ada lima ide pokok dari pembangunan yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan merupakan sebuah proses

Sebagai sebuah proses, pembangunan berkelanjutan selama bangsa tersebut ada dan memiliki tahapan yang pada satu pihak sebagai independensi dan pada pihak lain sebagai bagian yang tidak pernah berakhir. Artinya, pembangunan harus terus berjalan berdasarkan tahapannya yang sesuai dengan waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

b. Pembangunan dilakukan secara sadar

Pembangunan harus berjalan dengan sadar. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat tanpa melewati proses atau tahapan tertentu dan dilaksanakan hanya sesekali tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan, meskipun mendapatkan dukungan dari masyarakat.

c. Pembangunan dilakukan secara terencana

Perencanaan dalam pembangunan berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Setiap tahapan mempunyai rentang waktu tertentu. Kegiatan merencanakan bertujuan untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

d. Pembangunan mengarah pada modernitas

Modernitas adalah cara hidup yang lebih baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Demikian pula, pola pikir lebih rasional tetapi tetap memiliki nilai budaya yang lebih kuat dan mempertahankan

tingkat fleksibilitasnya. Modernitas yang terkait dalam pembangunan tidak bersifat tunggal, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Pembangunan wadah pembinaan bangsa

Wadah pembinaan bangsa memiliki fungsi untuk memperkuat pondasinya dan memperkuat kehadirannya di dunia internasional.

Wadah pembangunan ini diharapkan dapat membawa kesetaraan bagi bangsa dan negara lain di dunia. Wadah ini pula diharapkan dapat menghilangkan status negara berkembang, negara miskin, dan sebagainya yang membawa stigma negatif dalam dunia internasional.

3. Tujuan Pembangunan

Menurut Anggara & Sumantri (2016) tujuan pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pembangunan ialah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan,
- b. Tujuan pembangunan tidak memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, akan tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara masih ada di muka bumi sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan untuk masyarakat.

Maka dari itu, pembangunan yang telah dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan kebutuhan potensinya perlu diawasi pelaksanaan dan kesinambungannya. Pengawasan tidak hanya menjadi

milik mutlak pemerintah, tetapi semua lapisan masyarakat boleh ikut serta dalam pengawasan sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

D. Konsep Partisipatif

1. Pengertian Partisipatif

Partisipatif memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui proses pembangunan, karena upaya pemerintah tersebut telah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, partisipatif artinya hal turut berperan serta dalam kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.

Partisipatif menurut Laily (2015) mengartikannya sebagai kesediaan untuk membantu setiap keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri. Dalam kasus yang paling ideal, partisipatif adalah ukuran dari tingkat partisipasi rakyat. Semakin tinggi kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri, semakin besar pula kemampuannya untuk berkembang.

Menurut Mustanir & Abadi (2017) partisipatif adalah kontribusi atau keterlibatan masyarakat dalam proses interaksi sosial, untuk mengetahui masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat dalam kondisi tertentu,

baik dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah, pelaksanaan usaha menangani masalah, dan proses keikutsertaan masyarakat dalam menilai perubahan yang terjadi. Partisipatif memberi masyarakat ruang untuk turut mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan sejak awal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Rumusan FAO mendefinisikan bahwa partisipatif ialah keikutsertaan masyarakat dalam perubahan yang ditemukan dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antar masyarakat setempat dengan aparat yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan proyek untuk mereka mendapatkan informasi tentang konteks lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya proyek

Secara umum definisi partisipatif yaitu semua anggota atau perwakilan masyarakat berperan serta dalam perumusan rencana dan pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan, termasuk memutuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang diperoleh, dan bagaimana menerapkan dan mengevaluasi hasil implementasinya.

2. Jenis-Jenis Partisipatif

Menurut Hendra (2013) bentuk partisipatif terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Partisipatif Pasif

Partisipatif pasif adalah sikap berperilaku dan bertindak dalam

melakukan hal-hal yang menghambat kelanjutan jalannya pembangunan.

b. Partisipatif Aktif

- 1) Memikirkan nasib dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sebagai saluran mencapai cita-cita,
- 2) Adanya kesadaran publik yang tinggi untuk menyerahkan penentuan nasib mereka kepada orang lain, seperti pemimpin, tokoh masyarakat yang bersifat formal atau non formal,
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab,
- 4) Mematuhi berbagai peraturan pemerintah yang berlaku,
- 5) Bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum.

E. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif ialah rencana yang bertujuan melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia membutuhkan partisipasi langsung masyarakat yang menerima rencana pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat yang menerima program, maka hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan partisipatif berarti menekankan partisipasi luas dari semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan

keputusan dalam pembangunan. Esensi perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pembangunan yang mengaktualkan perilaku kepublikan yang berorientasi dalam peningkatan kemandirian, kredibilitas, kemitraan dan keunggulan.

Perencanaan partisipatif merupakan upaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya guna mencapai kondisi yang diharapkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Menurut Suwandi (2012) proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program didasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat,
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan gagasan atau pemikiran melalui forum pertemuan, tanpa dibatasi oleh kemampuan bicara, waktu dan lokasi.

3. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak,
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administratif dan wilayah geografis,

- c. Setiap rencana yang akan dibangun semaksimal mungkin menjadi pelengkap dari rencana yang sudah ada, sedang dikembangkan, atau akan dibangun. Memperhatikan interaksi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut Puspasari (2013) ada tiga alasan utama pentingnya partisipatif dalam proses pembangunan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat bisa menjadi "telinga" untuk mendapatkan informasi terkait situasi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat.
2. Efektivitas dan efisiensi rencana atau program pembangunan akan lebih mudah didapatkan, terutama dalam kondisi kontribusi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi secara etik dan moral ialah hak demokratis masyarakat, oleh karena itu dengan partisipasi maksimal maka dengan sendirinya pemerintah akan mengurangi potensi resistensi dan efek samping proses sosial terhadap pembangunan.

Ada beberapa keuntungan mengikutsertakan partisipatif dalam perencanaan pembangunan yaitu *Pertama*, pembangunan akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Artinya, jika masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan maka akan menciptakan kendali atas pembangunan. *Kedua*, pembangunan berorientasi kepada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik, karena masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan maka masyarakat dapat mengontrol pembangunan

yang sedang berlangsung. Partisipatif dalam perencanaan pembangunan sangatlah menjadi hal yang penting untuk membantu pemerintah agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Menurut Maryam & Dewi (2013) ada 7 (tujuh) ciri-ciri perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu:

1. Konsep pembangunan partisipatif identik dengan kekuasaan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Karena mereka adalah orang-orang yang memahami masalah dan kebutuhan dalam rangka mengembangkan wilayahnya sendiri. Mereka akan memanfaatkan dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerah mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, semua program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat;
2. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan bekerja sama dalam menjalankan pembangunan;
3. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pada setiap tahap pembangunan dan menikmati manfaat kegiatan pembangunan secara adil;
4. Pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah

serta mufakat dengan senantiasa berorientasi terhadap kepentingan masyarakat miskin;

5. Masyarakat wajib mempunyai akses yang mencukupi terhadap seluruh informasi serta proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan bisa dilakukan secara transparan serta dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, sah ataupun administratif;
6. Tiap pengambilan keputusan wajib memikirkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya disaat sekarang tetapi juga di masa yang akan datang dengan senantiasa melindungi kelestarian lingkungan;
7. Dalam menciptakan partisipasi, pemerintah sudah membentuk suatu forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang biasa disebut Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).

Perencanaan pembangunan partisipatif dapat berjalan dengan baik jika prakondisi yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Maka dari itu, menurut Manghayu (2018) perlu diperhatikan terdapat 6 (enam) prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan partisipatif yaitu:

1. Diantara seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus mengedepankan sikap saling percaya, saling memahami dan bisa bekerja sama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya ketebukaan serta kejujuran;
2. Prinsip kesetaraan dimaksudkan supaya seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa berbicara dan

mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan;

3. Prinsip demokrasi menghendaki adanya proses pengambilan keputusan dengan kesepakatan bersama, bukan dilakukan dengan rekayasa oleh kelompok tertentu;
4. Perencanaan pembangunan sebaiknya didasarkan pada suatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan bersumber pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya atau kepalsuan.;
5. Taat asas dalam berpikir. Prinsip ini menuntut dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus memakai metode berpikir obyektif, runtut serta mantap.

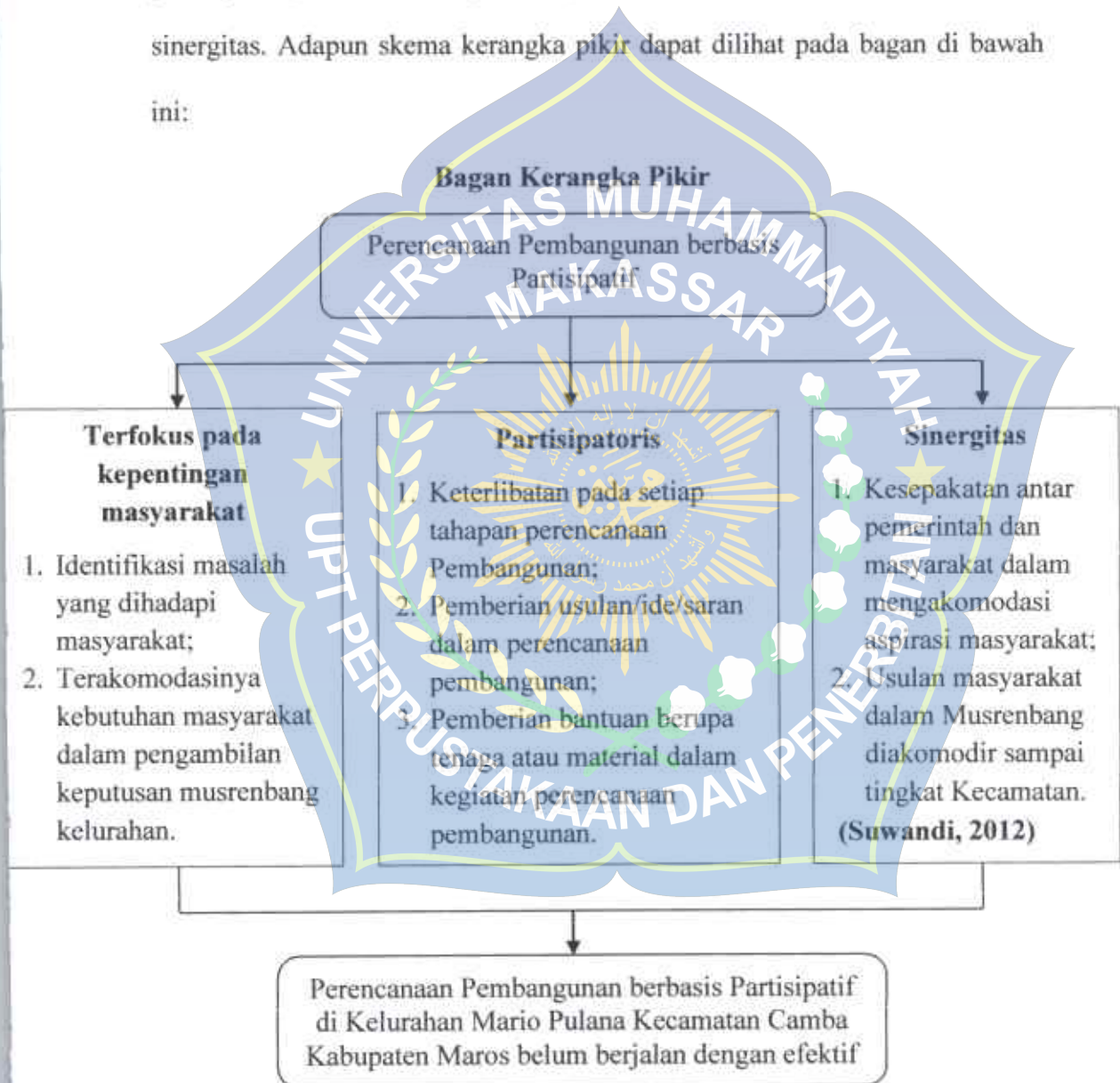
F. Kerangka Pikir

Pembangunan partisipatif dimulai dengan realisasi bahwa kinerja rencana pembangunan masyarakat sangat bergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Dalam pembangunan secara partisipatif, masyarakat seringkali merasa awam karena peran aparat daerah yang kurang optimal. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Hal ini diperlukan karena masyarakat sendiri yang memahami apa yang dibutuhkan dan hal apa saja yang perlu dibangun di daerah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dampak dari pembangunan yang direncanakan itu ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba

Kabupaten maros, peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Suwandi (2012) tentang proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dan sinergitas. Adapun skema kerangka pikir dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji lebih dalam berdasarkan teori

atau konsep dalam tinjauan pustaka. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dan sinergitas.

H. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan, sehingga didapatkan daftar masalah meliputi:
 - a. Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat yaitu proses yang dilakukan aparat Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba dalam mengetahui, mengumpulkan dan merumuskan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan;
 - b. Terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan yaitu kebutuhan masyarakat dapat ditampung atau diterima dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Partisipatoris yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan mendapatkan peluang dalam memberikan sumbangan pikiran tanpa dihalangi oleh kemampuan bicara, tempat dan waktu yang meliputi:

- a. Keterlibatan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan yaitu aparat pemerintah mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat juga melibatkan diri dengan mengambil bagian pada setiap tahapan Musrenbang mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan tahapan pasca pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - b. Pemberian usulan/ide/saran dalam perencanaan pembangunan yaitu bentuk pemberian usulan atau ide dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya perencanaan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat;
 - c. Pemberian bantuan berupa tenaga atau material dalam kegiatan perencanaan pembangunan yaitu partisipasi yang diberikan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan untuk terlaksananya pembangunan, yang biasanya berupa uang ataupun pertolongan untuk orang lain.
3. Sinergitas yaitu terjadinya kesatuan tindakan dari setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam setiap kegiatan Musrenbang yang meliputi:
- a. Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yaitu bentuk kesepakatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam memutuskan alternatif

permasalahan berdasarkan pertimbangan bersama;

- b. Usulan masyarakat dalam Musrenbang diakomodir sampai tingkat

Kecamatan yaitu terkomodirnya semua usulan masyarakat yang diajukan ke tingkat kecamatan dan respon atau tanggapan yang diberikan masyarakat terkait usulan yang dapat terakomodir maupun tidak terakomodir di tingkat kecamatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar yaitu sejak 10 Mei sampai 03 Juli 2021. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Suharsaputra (2018) kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.
2. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana deskriptif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bacaan seperti buku-buku, kajian pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dapat juga berupa laporan atau dokumen yang bersumber dari lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan

Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini ialah orang yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Peneliti telah menentukan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Hj. Salmawaty, S.Sos	SW	Kepala Kelurahan
2.	Ikhwan, S.Sos	IW	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3.	Syamsuhar	SS	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana
4.	Syarifuddin Mado	SD	Bhabinkamtibmas Kelurahan Mario Pulana
5.	Hj. Ramlah, S.Pd	RL	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Mario Pulana
6.	Hamka	HK	Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kelurahan Mario Pulana
7.	Bakri	BK	Imam Kelurahan Mario Pulana
8.	Nurlela	NL	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang
9.	Anggi	AG	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang
10.	Tino	TN	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang
11.	Salma	SM	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, maka dari itu seseorang harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang cukup andal karena peneliti dapat secara langsung melihat suatu kegiatan secara rinci, dengan mengamati langsung peneliti juga dapat melihat setting lingkungan yang ada dimana terjadinya kegiatan sehingga pemahaman akan situasi akan lebih komprehensif (Suharsaputra, 2018). Dalam konteks penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya dengan informan yang mengetahui banyak hal tentang objek dan masalah peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan konkret tentang perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan kegiatan serta keterangan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2015).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah selanjutnya dalam pengelolaan data, dimana data yang didapat, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa

untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Rijali (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data ialah proses pemilihan, menekankan pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada. Proses akan terus berjalan selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.
2. Penyajian data ialah kegiatan yang dilakukan pada saat menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan adalah dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan.

G. Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Menurut Sugiyono (2014) triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti akan membandingkan hasil observasi dengan wawancara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk menemukan dari sumber yang sama. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian akan membahas lebih lanjut dengan informan terkait atau pihak lain untuk menyakinkan data mana merupakan data yang benar ataupun bisa saja semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Teknik ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan suatu data/informasi dengan mempertimbangkan waktu pengumpulan data. Data yang didapatkan pada saat wawancara di pagi hari narasumber masih segar, belum adanya masalah dan memberikan informasi yang akurat agar informasi yang diberikan semakin menyakinkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan judul perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Pada hasil penelitian ini juga akan memaparkan tentang profil Kelurahan Mario Pulana.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Wilayah

Kelurahan Mario Pulana adalah sebuah kelurahan yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Mario Pulana berstatus sebagai kelurahan definitif dan tergolong sebagai kelurahan swakarya. Keadaan geografi Kelurahan Mario Pulana adalah daerah dataran tinggi dan mempunyai topografi lembah dan berbukit dengan ketinggian 320-720 mdpld dengan luas sekitar 16,70 km. Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros terbagi menjadi 11 RT dan 3 Rw, yang mempunyai tiga wilayah pembagian administratif berupa lingkungan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Barugae
- b. Lingkungan Bonto Marannu
- c. Lingkungan Mario

Jarak Kelurahan Mario Pulana dengan ibu kota Kecamatan Camba 5 km dan 54 km dari ibu kota Kabupaten Maros serta 82 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Patanyamang
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Barugae
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Padaelo
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sawaru



Gambar 4.1 Peta Kelurahan Mario Pulana

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data yang didapatkan pada kantor Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk sebanyak 1.392 jiwa, yang terdiri dari 689 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 703 jiwa. Jumlah rumah tangga sebanyak 420 kepala keluarga. Umur penduduk Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros baik laki-laki maupun perempuan terbanyak

tersebar mulai pada kelompok umur antara 0-4 tahun sampai dengan 50-54 dan pada kelompok umur 55-59 tahun mulai menurun.

Mayoritas penduduk Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa Kabupaten Maros berasal dari suku atau etnis Bugis-Makassar dan menganut agama Islam, sedangkan sarana ibadah yang digunakan sehari-hari oleh penduduk Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1

Sarana Ibadah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa

No	Sarana Ibadah	Banyaknya (Buah)
1.	Masjid	3
2.	Mushollah	2
	Jumlah	5

Sumber: Kantor Kelurahan Mario Pulana

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana ibadah yang digunakan masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa sebanyak 3 Masjid dan 2 Mushollah.

3. Pertanian

Sektor pertanian di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa, khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Mario Pulana. Dilihat dari luas wilayah Kelurahan Mario Pulana seluas 16,70 km² terdiri dari persawahan dan non sawah.

Selain lahan pertanian 49 hektar digunakan untuk perumahan/pemukiman, 2 hektar digunakan untuk industri/ perkantoran/ pertokoan, dan 5 hektar lainnya. Dilihat dari jumlah populasi ternak besar

di Kelurahan Mario Pulana sebanyak 499 ekor sapi, 2 ekor ternak unggas seperti ayam kampung sebanyak 11.973 ekor dan ayam ras 3.000 ekor.

4. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba terdapat 1 Poskesdes dan 2 unit Posyandu dengan 1 bidan dan bidan tradisional yang menangani proses persalinan.

5. Transportasi dan Komunitas

Jalan utama menuju Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba juga merupakan jalur Trans Sulawesi yaitu menuju Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melalui titik penyeberangan perbatasan pelabuhan Bajoe. Jenis transportasi yang dimiliki dan digunakan masyarakat adalah transportasi darat dengan kendaraan roda empat dan roda dua/tiga. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, radio, telepon, dan telepon genggam yang berkembang, hampir setiap orang dapat secara langsung memperoleh informasi melalui siaran televisi dan radio, serta dapat berkomunikasi melalui telepon dan *Handphone*. Dan dengan terdapatnya Kantor Pos di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba memudahkan masyarakat untuk berkorespondensi ataupun pengiriman uang atau barang.

6. Perekonomian

Sektor usaha yang menjadi pekerjaan utama masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba adalah pertanian, kemudian disusul sektor

perkebunan, perdagangan, jasa pendidikan, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan.

7. Tugas dan Struktur Organisasi Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pegawai Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

a. Lurah

- 1) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Kelurahan;
- 2) Mengatur kegiatan Kelurahan, termasuk penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional Kelurahan;
- 3) Mengatur dan memberikan tugas kepada bawahan;
- 4) Memerintahkan bawahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan, kegiatan sosial, ekonomi, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan berorientasi;
- 7) Memajukan penyelenggaraan pemerintah umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan memajukan perdamaian dan ketertiban umum di wilayah;

- 8) Menyusun rencana/kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan;
- 9) Memfasilitasi pembentukan dan penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun tetangga dalam Lingkungan Kelurahan;
- 10) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum dengan satuan kerja setempat atau instansi terkait;
- 11) Mengevaluasi kegiatan berdasarkan hasil yang diperoleh;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat baik secara lisan maupun tertulis.

b. Sekretaris Lurah

- 1) Menyusun program dan rencana kerja serta anggaran kegiatan Kelurahan;
- 2) Mengatur dan membagikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing kepada kepala seksi;
- 3) Memberikan instruksi kepada kepala seksi untuk melakukan tugas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan seperti: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Kelurahan;
- 5) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan;
- 6) Mengawasi dan membina pegawai di lingkungan Kelurahan;
- 7) Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan di wilayah

Kelurahan;

- 8) Memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada kepala seksi di Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan;
- 9) Mengawasi dan memeriksa proses administrasi dan ketatausahaan dan sarana prasarana Kelurahan;
- 10) Menyiapkan kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan, dan menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;
- 11) Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan Kelurahan dan pemeliharannya;
- 12) Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

- 1) Merumuskan rencana kerja bidang pemerintahan di Kelurahan;
- 2) Mengatur dan memberikan tugas kepada karyawan staf sesuai tanggung jawabnya masing-masing;
- 3) Mengawasi dan memeriksa berkas-berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- 4) Melatih dan membimbing staf untuk meningkatkan kinerja pelayanan mereka kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan data pelayanan Kelurahan di bidang pemerintahan;

- 6) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data Profil Kelurahan/Monografi;
- 7) Memberikan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- 8) Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan;
- 9) Membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan setiap kegiatan dan melaporkan kepada Lurah;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya, dan melaporkan kepada pimpinan pelaksanaan tugas tersebut.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Merencanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
- 2) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan, antara lain penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- 3) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

termasuk koordinasi dengan satuan kerja/lembaga terkait dalam rangka penanganan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit, dan masalah pencemaran lingkungan;

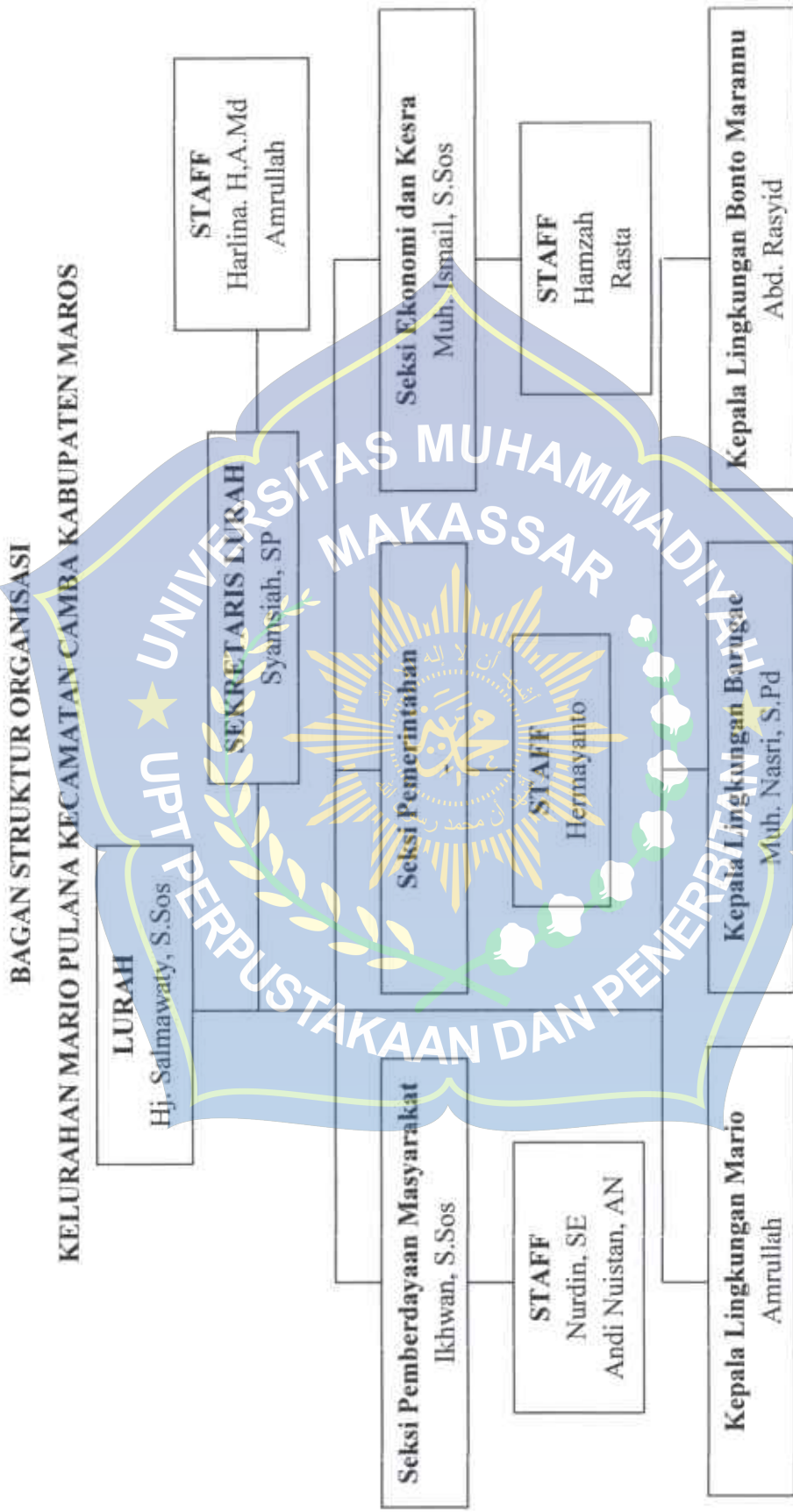
- 4) Membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah dan badan swasta yang melaksanakan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- 5) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk koordinasi dengan pihak swasta untuk pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
- 6) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan seluruh unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki rencana kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan swasta;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan;

e. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina dan melaksanakan pekerjaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Membina dan mengawasi kegiatan program pendidikan, generasi muda, olahraga, budaya, pramuka dan peranan perempuan;

- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- 5) Mendorong terselenggaranya sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- 7) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan;
- 8) Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 9) Melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup tanggung jawab yang diberikan oleh Lurah.

h. Struktur Organisasi Kelurahan Mario Pulana



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Mario Pulana (Sumber: Kantor Kelurahan Mario Pulana)

B. Hasil Penelitian

Dalam menciptakan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, terdapat beberapa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif menurut Wicaksono & Sugiarto (Suwandi, 2012) yaitu terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris dan sinergitas yang diuraikan sebagai berikut:

1. Terfokus pada Kepentingan Masyarakat

Terfokus pada kepentingan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan, sehingga didapatkan daftar masalah meliputi:

a. Identifikasi Masalah Yang Dihadapi Masyarakat

Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat yaitu proses yang dilakukan aparat Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba dalam mengetahui, mengumpulkan dan merumuskan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana:

“Proses dalam identifikasi masalah di sini, kita mengadakan Musrenbang dan Rapat Koordinasi yang dilakukan sekali setahun, Kita hadirkan masyarakat, aparatur pemerintah dari kecamatan, lembaga masyarakat yang ada di sini, dan pihak-pihak dari bidang pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat akan memberikan usulan kemudian ditanggapi oleh aparat pemerintah atau narasumber yang ada. Selanjutnya akan dibuatkan daftar masalah dan daftar usulan program yang telah disepakati bersama, nanti usulan akan diajukan ke tingkat Kecamatan untuk dibahas diselanjutnta” (Hasil wawancara peneliti dengan IW pada tanggal 25 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi dapat disimpulkan, bahwa proses dalam mengidentifikasi masalah dilakukan dengan mengadakan Musrenbang atau rapat-rapat koordinasi yang dilakukan sekali setahun. Proses yang dilakukan dengan menghadirkan masyarakat, aparat pemerintah Kecamatan, bahkan lembaga-lembaga masyarakat, serta pihak-pihak *stakeholders* seperti dari bidang pendidikan dan kesehatan yang ada. Masyarakat memberikan usulan atau pendapatnya tentang masalah atau kebutuhan yang dihadapi, lalu aparat pemerintah dan narasumber lain akan menanggapi usulan dari masyarakat. Setelah itu akan dibuatkan daftar masalah dan daftar usulan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya wawancara bersama Kepala Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Identifikasi masalah di sini ada dua yang biasa dilakukan yaitu Musrenbang sama rapat koordinasi, kalau Musrenbang itu kita yang selenggarakan kalau rapat koordinasi itu dari Kepala Lingkungan masing-masing. Sebelum diseleksi masalah dan kebutuhan, kita review dulu bersama terhadap kebutuhan atau masalahnya untuk kita tahu apakah benar ini adanya dan sesuai tidak dengan keadaan masyarakat Mario Pulana. Dan itu ada daftar masalahnya, jadi masyarakat memaparkan terlebih dahulu apa masalahnya baru diberikan nomor atau ranking mulai masalah yang paling mendesak sampai masalah yang ringan. Nanti setelah itu kita musyawarakan bersama lalu kita putuskan bersama-sama mana kebutuhan yang akan dijadikan prioritas.” (Hasil wawancara peneliti dengan SW pada tanggal 28 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan seleksi masalah akan dilakukan review terlebih

dahulu untuk mengetahui validitas kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Semua usulan yang diajukan akan dikumpulkan melalui daftar masalah dan setiap usulan akan diberikan nomor atau ranking berdasarkan skala prioritas usulan yang diajukan.

Kutipan wawancara di atas didukung dengan pernyataan dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Mario Pulana, yang mengatakan bahwa:

“Proses identifikasi masalah di sini dilakukan dengan melakukan musyawarah atau biasa disebut itu Musrenbang untuk cari tahu masalah masyarakat, ada juga rapat koordinasi koordinasi antara Kepala Lingkungan sama masyarakat disetiap lingkungan karena disinikan ada tiga lingkungan. Lalu nanti dibuat daftar informasinya yang isinya itu tentang semua usulannya masyarakat disetiap lingkungan. Nah rapat koordinasi itu duluan dilakukan baru Musrenbang dan prosesnya hampir sama, mengumpulkan masyarakat dan cari tahu masalahnya kemudian ada daftar masalahnya. Nanti hasil rapat koordinasi itu di ajukan ke Musrenbang Kelurahan dan hasil Musrenbang Kelurahan itu di ajukan ke tingkat Kecamatan.” (Wawancara peneliti dengan SD pada tanggal 28 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, proses identifikasi masalah dimulai dari rapat koordinasi setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Mario Pulana dengan mekanisme yang hampir sama dengan Musrenbang, menghadirkan masyarakat dan mencari pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh untuk dipilih mana masalah yang diajukan ke Musrenbang Kelurahan dan daftar usulan yang diajukan ke tingkat Kecamatan setelah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Identifikasi masalah yang dilakukan dalam Musrenbang Kelurahan Mario Pulana ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari terbatasnya infrastruktur jalan, dan belum semuanya jembatan-jembatan di setiap lingkungan terbangun. Daftar masalah yang ditemukan saat proses identifikasi masalah Musrenbang Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Masalah Musrenbang Kelurahan 2021

No	Uraian Masalah	Lokasi Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah
1.	Terbatasnya Infrastruktur Jalan	Lingkungan Mario	Pembangunan Jalan Tani
2.	Kerusakan Infrastruktur (Jalan)	Lingkungan Mario & Lingkungan Barugae	Peningkatan Kualitas Jalan
3.	Kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan	Lingkungan Barugae	Revitalisasi Posyandu
4.	Kerusakan Infrastruktur (Jembatan)	Lingkungan Mario	Perbaikan Jembatan
5.	Jauhnya Masjid dari rumah masyarakat yang berada di Lingkungan Mario	Lingkungan Mario	Pembangunan Mushollah
6.	Meningkatnya skala kerusakan disebabkan longsor pada tebing saluran	Lingkungan Bonto Marannu dan Barugae	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
7.	Pandemi Covid-19 belum berakhir, masyarakat harus menerima informasi terkait dengan pelaksanaan vaksin agar tidak terjadi simpangsiur informasi tentang vaksin Covid-19	Semua Lingkungan	Sosialisasi Vaksin Covid-19 dalam rangka penanganan dan Pencegahan Covid-19
8.	Kurangnya penerangan jalan, sehingga menyebabkan banyak kecelakaan pada malam hari	Lingkungan Bonto Marannu	Pengadaan <i>Delineator</i> atau patok tikungan
9.	Kurang produktifnya masyarakat dalam menjalankan usaha madu	Semua Lingkungan	Pelatihan Keterampilan Usaha Madu

Sumber: Data Kelurahan Mario Pulana

Selanjutnya wawancara dengan Imam Kelurahan Mario Pulana yang menyatakan bahwa:

“Di sini kalau identifikasi masalah iya betul musrenbang sama rapat-rapat koordinasi kegiatan yang sering dilakukan kalau mau cari tahu masalah tentang pembangunan disini. Musrenbang juga memudahkan pemerintah cari masalah yang ada dimasyarakat. Dan disitu dibahas semua, setelah semua kita dengar usulan atau masalah, baru diputuskan masalah yang mendesak. Karena itumi dek, supaya pembangunan disini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan supaya juga ada keterbukaan antara pemerintah disini sama kita masyarakat.” (Hasil wawancara peneliti dengan BK pada tanggal 03 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Musrenbang dan rapat koordinasi akan lebih memudahkan aparat pemerintah untuk melakukan identifikasi terkait dengan masalah masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terfokus kepada apa yang diinginkan masyarakat dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dibahas terkait dengan pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang menyatakan bahwa:

“Proses identifikasi masalah disini sebenarnya dua yaitu Musrenbang sama Rapat Koordinasi. Tapi rapat koordinasi ini jarang sekali diadakan, kayak tahun ini tidak ada rapat koordinasi na adakan kepala lingkungan, katanya sibuk jadi tidak sempatmi adakan rapat. Saya juga tidak pernahka hadir ka tidak ada informasi kalau ada kegiatannya. Jadi biasa musrenbangji saya hadiri.” (Hasil wawancara peneliti dengan TN pada tanggal 07 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi yang menjadi sarana untuk melakukan identifikasi masalah kebutuhan masyarakat jarang diadakan oleh Kepala Lingkungan. Dan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan sehingga menjadi penghambat masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.

b. Terakomodasinya Kebutuhan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Musrenbang Kelurahan

Terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan yaitu kebutuhan masyarakat dapat ditampung atau diterima dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama saya menjadi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan mengikuti ini kegiatan musrenbang, semua usulan masyarakat ditampung dan didengarkan. Semua juga dilakukan dengan terbuka, semua usulan dicarikan solusinya supaya bisa terakomodir dengan baik.” (Hasil wawancara dengan SS pada tanggal 3 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang ditampung dan didengarkan oleh pihak penyelenggara. Semua proses dilakukan dengan terbuka kepada masyarakat dan semua usulan diberikan solusi agar dapat terakomodir dengan baik.

Selanjutnya wawancara bersama Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejauh ini, semua kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan semua sudah terakomodasi dengan baik. Dan usulan juga disampaikan juga bukan sekedar keinginan tetapi benar-benar itu yang menjadi kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara peneliti dengan AG pada tanggal 03 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah terakomodasi dengan baik, dan semua usulan yang disampaikan bukan hanya sekedar keinginan tetapi memang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kelurahan Mario Pulana sebagai berikut:

"Saya rasa terakomodasi mi semua dek kebutuhannya masyarakat disini. Karena setiap saya hadir kalau ada musrenbang di kantor Kelurahan, apa yang kita sampaikan selalu didengarkan pemerintah. Dan Alhamdulillah dalam pengambilan keputusan itu sesuai sama apa yang diusulkan semua masyarakat Contohnya itu pembangunan jalan dan mushollah itu yang salah satunya diputuskan dalam daftar program, jadi benar-benar apa yang kita usulkan dan diputuskan terakomodasi." (Hasil wawancara peneliti dengan HK pada tanggal 22 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat sudah terakomodasi, di mana usulan yang diberikan pada saat pembahasan perencanaan pembangunan dapat didengarkan oleh pemerintah Kelurahan Mario Pulana dan hasil keputusan pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Partisipatoris

Partisipatoris yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan mendapatkan peluang dalam memberikan sumbangan pikiran tanpa dihalangi oleh kemampuan bicara, tempat dan waktu yang meliputi:

a. Keterlibatan Pada Setiap Tahapan Perencanaan Pembangunan

Keterlibatan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan yaitu aparat pemerintah mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat juga melibatkan diri dengan mengambil bagian pada setiap tahapan Musrenbang mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan tahapan pasca pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Berikut wawancara bersama dengan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Ya kita selalu dilibatkan, dan masyarakat juga sangat aktif ikuti semua tahapannya mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai pengambilan keputusan. Setiap tahapan juga saya rasa berjalan dengan baik, karena kita paham semua alurnya.” (Hasil wawancara peneliti dengan SM pada tanggal 03 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan akhir sudah aktif. Masyarakat juga sudah paham bagaimana alur dari tahapan Musrenbang sehingga semua dapat berjalan dengan baik.

Hal sama dikemukakan juga oleh Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Iya dilibatkan semua dan kita ikuti semua tahap-tahap yang ada, sampai pengambilan keputusan juga kita ikuti supaya kita bisa tahu usulan mana yang diterima. Tapi mungkin masih perlu ditingkatkan kehadiran masyarakat, karena yang hadir masih sedikit, bagus itu kalau banyak masyarakat yang hadir supaya lebih efektif berjalan ini Musrenbang.” (Hasil wawancara peneliti dengan AG 05 Juni 2021)

Dari pendapat informan di atas bahwa masyarakat mengikuti setiap tahapan-tahapan yang ada dalam Musrenbang dengan baik. Bahkan masyarakat juga mendapatkan undangan untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang dan peningkatan kehadiran masyarakat sangat diharapkan agar musrenbang dapat berjalan lebih efektif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

"Iya selalu dilibatkan pastinya. Yang jelas di sini kita selalu beri pembelajaran kepada masyarakat supaya selalu terlibat dalam perencanaan pembangunan bahkan pelaksanaan dan pengawasannya juga harus terlibat. Di mana kita juga harapkan masyarakat berpartisipasi aktif dan berperan dalam mengatasi permasalahan di daerahnya masing-masing." (Hasil Wawancara dengan SS pada tanggal 03 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu nilai positif dengan dilaksanakannya Musrenbang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar selalu terlibat dan dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Diharapkan pula masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam mengatasi permasalahan di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah masyarakat selalu dilibatkan. Berkat ini juga, sudah jauh lebih baik saya lihat keterlibatannya semua terlebih masyarakat di sini saat rapat daripada tahun-tahun sebelumnya, kalau saya hadir mereka semua dengan antusias mengelurkan pendapatnya pada saat rapat, tapi yang datang sedikit sekali dari masyarakat. Padahal sangat diharapkan masyarakat hadir supaya bisa ditahu semua masalah yang disini.” (Hasil Wawancara dengan RL pada tanggal 23 Juni 2021)

Hal senada juga disampaikan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Iya kita selalu libatkan masyarakat mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap akhir. Tapi permasalahan disini masih perlu ditingkat kehadiran masyarakat karena itu masih rendah. Biasakan kita adakan musyawarah sekitar jam 9 atau jam 10, itu masyarakat yang datang tidak lebih dari 10 orang. Apalagi kita selalu mengharapkan itu ada hadir dari tokoh-tokoh perempuan. Jadi di sini hambatannya kita.” (Hasil wawancara dengan IW pada tanggal 25 Mei 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan pada kegiatan Musrenbang. Keterlibatan masyarakat juga sudah meningkat dengan melihat antusias masyarakat dalam memberikan pendapat. Namun kehadiran masyarakat masih menjadi kendala, karena yang hadir masih sangat sedikit. Hasil wawancara di atas didukung dengan data sekunder yang didapatkan peneliti mengenai daftar hadir peserta Musrenbang Kelurahan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Al-Ikhsan, S.Pt	Cenrana	Staff Kecamatan
2.	Hj. Salmawaty, S.Sos	Sawaru	Lurah Mario Pulana
3.	Abdul Rahman	Laiya	Staff Kecamatan
4.	Muh. Nasri, S.Pd	Barugae	Kepala Lingkungan Barugae
5.	Nurlela	Mario	Masyarakat
6.	Hasnah	Mario	Masyarakat
7.	Bakri	Mario	Tokoh Masyarakat
8.	Amirullah	Mario	Kepala Lingkungan Mario
9.	Abd. Rasyid	Bonto Marannu	Kepala Lingkungan Bonto Marannu
10.	Ikhwan, S.Sos	Mario	Staff Kelurahan
11.	Nurda	Barugae	Bidan Lingkungan Barugae
12.	Hj. Syamsiah	Barugae	Ketua Tim PKK Kelurahan Mario Pulana
13.	Hj. Madi	Bonto Marannu	Masyarakat
15.	Ramiah	Cempaniga	Kepala Sekolah SDN 13 Inpres Barugae
16.	Radiah	Mario	Masyarakat
17.	Syamsuhar	Mario Pulana	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
18.	Anggi	Bonto Marannu	Masyarakat
20.	Hamka	Bonto Marannu	Tokoh Pemuda
21.	Syarifuddin Mado	Mario Pulana	Bhabinkamtibmas
23.	Syukur	Barugae	Masyarakat
24.	Hatta	Mario	Masyarakat
25.	Salma	Bonto Marannu	Masyarakat
26.	Mayang Sari	Mario Pulana	Ketua Pustu Kelurahan Mario Pulana
27.	Tino	Bonto Marannu	Masyarakat
28.	Hj. Ramlah, S.Pd	Mario	Anggota Tim PKK Kelurahan Mario Pulana

Sumber: Data dari Kelurahan Mario Pulana

b. Pemberian Usulan/Ide/Saran dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Pemberian usulan/ide/saran dalam perencanaan pembangunan yaitu bentuk pemberian usulan atau ide dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya perencanaan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Mengenai usulan yang diberikan itu sangat beragam, kemarin usulannya ada yang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kalau pembangunan fisik seperti pembangunan mushollah, jembatan. Kalau pembangunan non fisik itu sosialisasi vaksin Covid-19 sama pembinaan dan pelatihan usaha madu.” (Hasil wawancara dengan SW pada tanggal 28 Mei 2021)

Hal sama dikemukakan juga oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Kalau dari segi pemberian usulan atau ide masyarakat antusias sekali menyebutkan usulannya satu persatu. Ada yang usulannya yang pembangunan fisik sampai non fisik. Bahkan lebih banyak yang mengusulkan tentang pembangunan fisik seperti jembatan, jalanan, ada juga yang usulkan musholla yah seperti itu. Kalau non fisiknya itu kalau tidak salah mau adakan penyuluhan tentang sistem pertanian.” (Hasil wawancara dengan SD pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil obervasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian usulan atau ide dari masyarakat sangat beragam, mulai dari usulan tentang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik seperti.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Imam Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Kalau saat musrenbang saya selalu usulkan tentang apa yang memang benar kita butuhkan sekarang. Seperti musrenbang baru-baru ini, saya usulkan pembangunan irigasi sama jembatan. Karena kita butuh sekali itu apalagi jembatan sudah banyak rusak, kasihanki masyarakat kalau menyeberang. Kita juga mengusulkan untuk diadakan sosialisasi terkait dengan vaksin Covid-19 karena ini sangat penting, supaya masyarakat di sini tidak takut sangat pelaksanaan vaksin” (Hasil wawancara peneliti dengan BK pada tanggal 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Mario Pulana memberikan usulan atau pendapat mereka terkait dengan permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan tentang pembangunan dalam Musrenbang yang berlangsung. Usulan terkait dengan Vaksinasi Covid-19 juga diusulkan masyarakat Kelurahan Mario Pulana mengingat masa kondisi sekarang pandemic Covid-19 masih tinggi.

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang sebagai berikut:

“Kalau saya dek, kalau tidak sempatka datang di kantor Kelurahan biasa itu saya sampaikan usulanku ke Kepala Lingkungan apa yang kita butuhkan di sini contohnya itu kayak perbaikan jalanan karena banyak jalanan yang lubang-lubang, perbaikan irigasi sawah dan nanti kepala lingkunganmi yang sampaikan usulanta kalau ada rapat. Tapi saya selalu usahakan hadir kalau ada undangan, kecuali itumi adapi halangan baru tidak hadirka.” (Hasil wawancara peneliti dengan NL pada tanggal 07 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa walaupun tidak terlibat langsung dalam Musrenbang, akan tetapi sebagian masyarakat tetap berusaha untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan atau pendapat yang disampaikan kepada Kepala Lingkungan yang akan menyampaikan pendapat masyarakat di forum rapat atau musyawarah.

Terdapat beberapa daftar usulan pembangunan hasil musrenbang yang dilaksanakan di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Usulan Pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan Mario
Pulana Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1.	Pembangunan Jalan Tani	Lingkungan Mario	1 Paket, Sesuai RAB
2.	Perbaikan Jembatan	Lingkungan Mario	250 meter
3.	Pembangunan Musholla	Lingkungan Mario	1 Unit
4.	Peningkatan Kualitas Jalan	Lingkungan Mario	650 m
5.	Peningkatan Kualitas Jalan	Lingkungan Barugae	1300 m
6.	Revitalisasi Posyandu	Lingkungan Barugae	1 Unit
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Lingkungan Bonto Marannu dan Barugae	130 meter
8.	Pengadaan <i>Delineator</i> atau patok tikungan	Lingkungan Bonto Marannu	70 unit
9.	Sosialisasi Vaksin Covid-19 dalam rangka penanganan dan Pencegahan Covid-19	Semua Lingkungan	1 Kegiatan
10.	Pelatihan Keterampilan Usaha Madu	Semua Lingkungan	1 Kegiatan

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Mario Pulana

**c. Pemberian Bantuan Tenaga/Material lain dalam Kegiatan
Perencanaan Pembangunan**

Pemberian bantuan berupa tenaga atau material dalam kegiatan perencanaan pembangunan yaitu partisipasi yang diberikan masyarakat dalam kegiatan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan untuk terlaksananya pembangunan, yang biasanya berupa uang ataupun pertolongan untuk orang lain.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Untuk pemberian bantuan tenaga atau material sejauh ini Alhamdulillah masyarakat selalu membantu. Ada masyarakat yang berpartisipasi memberikan bantuan berupa sumbangan uang untuk pembangunan masjid, ada juga yang hibahkan tanahnya untuk dibangun jalan tani, kalau tenaga juga saat ada kegiatan Musrenbang tokoh masyarakat membantu untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang.” (Hasil wawancara peneliti dengan IW pada tanggal 25 Mei 2021).

Hal senada juga disampaikan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri dek, belum pernah beri bantuan seperti tenaga/meteril kalau Musrenbang. Tapi biasa itu dari yang lain kayak tokoh masyarakat atau lembaga pemberdayaan masyarakat bantu sebar undangan, ada juga yang beri bantuan kayak hibahkan tanah untuk pembangunan disini.” (Hasil wawancara dengan NL pada tanggal 07 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu membantu pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memberikan bantuan tenaga atau meteril yang berupa menghibahkan tanah milik masyarakat untuk membangun jalan tani, sumbangan uang untuk pembangunan mushollah dan saat ada kegiatan Musrenbang Tokoh Masyarakat membantu untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang.

Terdapat beberapa sumbangan masyarakat untuk pembangunan mushollah di Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kota Makassar, mulai dari sumbangan berupa uang dan barang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Daftar Pemberi Sumbangan Pembangunan Musholla

No	Nama Donatur	Alamat	Sumbangan		Ket
			Uang	Barang	
1.	H. Bakhtiar	Mario	Rp. 3.000.000	Tanah 6x8 m	
2.	Hj. Madi	Mario		Pasir 2 Truk	
3.	Bakri	Mario	Rp. 300.000		
4.	Suriani	Mario	Rp. 50.000		
5.	Yadi	Mario		Semen 8 Sak	
6.	Ence	Mario	Rp. 700.000		
7.	Hasnah	Mario	Rp. 350.000		
8.	Nurlela	Mario	Rp. 500.000		
9.	Hj. Salmawaty, S.Sos	Sawaru		Semen 5 Sak	
10.	Anggi	Mario	Rp. 500.000		
11.	Endi	Mario	Rp. 50.000		
12.	Hj. Sitti Salma	Mario	Rp. 2.500.000		
13.	H. Onda	Mario		Pasir 1 Truk	
14.	Ace	Mario	Rp. 1.500.000		
15.	Hj. Ema	Mario	Rp. 3.000.000		
16.	Radiah	Mario	Rp. 150.000		
17.	Syukri	Mario	Rp. 150.000		
18.	Karmila	Mario	Rp. 350.000		
19.	Hatta	Mario	Rp. 50.000		
20.	H. Rohman	Barugae		Batu Bata 2000 biji	
21.	Salmawati	Mario	Rp. 250.000		
22.	Muhammad Gunawan	Mario	Rp. 50.000		
23.	Tino	Mario	Rp. 50.000		
24.	H. Onda	Mario	Rp. 100.000		
Jumlah Total			Rp. 13.600.000		

Sumber: Data Kelurahan Mario Pulana

Selain sumbangan masyarakat terkait dengan pembangunan mushollah, masyarakat juga menghibahkan tanah untuk pembangunan jalan tani, yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6 Pemberian Hibah Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Tani

No	Nama Donatur	Bentuk Hibah
1.	Bakri	Tanah 5 m ²
2.	Hj. Samanta	Tanah 7,5 m ²
3.	Rahman S	Tanah 3 m ²
4.	Syafaruddin	Tanah 12 m ²
5.	H. Hantang	Tanah 3 m ²
6.	H. Tambo	Tanah 6 m ²

Sumber: Data Kelurahan Mario Pulana

Lebih lanjut lagi peneliti melakukan wawancara dengan Imam Kelurahan Mario Pulana sebagai berikut:

“Saya selalu berikan bantuan tenaga ku dek kalau ada panggilan dari kantor lurah untuk melaksanakan Musrenbang, bentuk tenaganya itu seperti membantu aparat pemerintah bagikan undangan Musrenbang ke Kepala Lingkungan, Ketua RT/RW, Tokoh pemuda sama panggil masyarakat supaya ikut hadir dalam Musrenbang di Kelurahan.” (Hasil wawancara peneliti dengan BK pada tanggal 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk tenaga yang diberikan dalam pemberian tenaga di kegiatan Musrenbang meliputi bantuan membagikan undangan ke Kepala Lingkungan, Ketua RT/RW, tokoh pemuda sampai masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Di sini partisipasinya baik dari segi tenaga ataupun materil itu atas dasar kesadaran kita sendiri. Karena kita paham betul kalau pasti aparat pemerintah juga perlu bantuan dari masyarakat, dari saling membantu juga kita bisa eratkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Kalau ada panggilan dari aparat pemerintah dan butuh bantuan tenaga, dengan senang hati kami membantu selagi masih mampu.” (Hasil wawancara peneliti dengan TN pada tanggal 07 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut melakukan pemberian tenaga atau meteril dengan kesadaran mereka sendiri demi membangun Kelurahan Mario Pulana lebih baik dan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

3. Sinergitas

Sinergitas yaitu terjadinya kesatuan tindakan dari setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam setiap kegiatan Musrenbang yang meliputi:

a. Kesepakatan antar Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Kesepakatan antar pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yaitu bentuk kesepakatan atau kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat sehingga terpilihnya alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Kesepakatan yang terjadi antar pemerintah dengan masyarakat itu ada dua saat Musrenbang yang pertama kesepakatan untuk memutuskan usulan yang akan dijadikan kegiatan untuk kelurahan ini sendiri yang dibiayai dari dana kelurahan atau alokasi dana masyarakat. Yang kedua itu, usulan yang nanti diajukan ke tingkat Kecamatan yang biayanya itu dari APBD Kabupaten/Kota.” (Hasil wawancara dengan IW pada tanggal 25 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat melakukan dua kesepakatan

dalam memilih kegiatan prioritas yakni kegiatan prioritas untuk kelurahan sendiri yang dibiayai dari dan kelurahan atau alakosi dana masyarakat dan kegiatan priotitas yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang biayanya itu dari APBD Kabupaten/Kota.

Hal senada juga disampaikan masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Ada dua kesepakatan, yang pertama kesepakatan untuk tentukan usulan mana yang akan dijadikan kegiatan untuk kelurahan di sini sama yang kedua kesepakatan untuk usulan yang diajukan ke tingkat kecamatan. Selain kesepakatan untuk kegiatan juga dilakukan kesepakatan untuk anggaran per kegiatan. Dan kesepakatan yang dilakukan juga sudah berjalan dengan baik karena kita lakukan pengambilan keputusan juga bersama. Jadi semua aspirasi masyarakat diakomodasi berdasarkan kesepakatan bersama.” (Hasil wawancara peneliti dengan SM pada tanggal 03 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan kesepakatan yang dilakukan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat selain menyepakati dua kesepakatan, juga dilakukan kesepakatan mengenai anggaran setiap kegiatan yang diusulkan. Semua kesepakatan yang dilakukan berdasarkan pada usulan masyarakat dan kesepakatan yang dilakukan juga sudah berjalan dengan baik karena dalam pengambilan keputusan juga dilakukan secara bersama-sama.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Kesepakatan yang dilakukan itu terbagi menjadi dua, pemerintah dan masyarakat putuskan kegiatan yang dijadikan prioritas untuk kelurahan ini sendiri sama kegiatan yang dijadikan prioritas untuk diajukan ke tingkat kecamatan. Kita juga melakukan kesepakatan untuk menentukan Tim Delagasi, itu terdiri dari 2 sampai 3 perwakilan dari masyarakat dan 3 orang dari aparat kelurahan yang nanti mewakili di tingkat kecamatan. Dan itu semuanya tidak terlepas dari kerjasama kita semua karena pengambilan keputusan yang terjadi pastinya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jangan sampai hanya pemerintah yang ambil keputusan dan akhirnya jadi permasalahan lagi.” (Hasil wawancara dengan RI pada tanggal 23 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi juga menentukan Tim Delagasi yang terdiri dari 2-3 orang perwakilan masyarakat dan 3 orang dari aparat kelurahan untuk mewakili hadir pada saat Musrenbang Kecamatan. Hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan kerjasama semua pihak dan agar menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat terkait keputusan yang disepakati. Hal ini sesuai dengan data sekunder yang didapatkan peneliti terkait dengan daftar Tim Delegasi yang telah dipilih secara bersama, berikut daftar Tim Delegasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 4.7 Tim Delegasi

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Hj. Salmawaty, S.Sos	48 Tahun	Kepala Kelurahan Mario Pulana
2.	Ikhwan, S.Sos	54 Tahun	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana
3.	Muh. Ismail, S.Sos	45 Tahun	Seksi Ekonomi dan Kesra
4.	Amirullah	48 Tahun	Kepala Lingkungan Mario
5.	Syukur	34 Tahun	Masyarakat Kelurahan Mario Pulana
6.	Salma	36 Tahun	Masyarakat Kelurahan Mario Pulana

Sumber: Data Kelurahan Mario Pulana

b. Usulan masyarakat dalam Musrenbang Diakomodir sampai Tingkat Kecamatan

Usulan masyarakat dalam Musrenbang diakomodir sampai tingkat Kecamatan yaitu terkomodirnya semua usulan masyarakat yang diajukan ke tingkat kecamatan dan respon yang diberikan masyarakat terkait usulan yang dapat terakomodir maupun tidak terakomodir di tingkat kecamatan.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang mengatakan bahwa:

“Tanggapan masyarakat sebenarnya beragam ada memberikan tanggapan yang baik ada juga yang tidak terima karena usulan yang diajukan di tingkat kecamatan belum terpenuhi. Karena kalau usulan masyarakat di tingkat kecamatan itu biasa banyak yang belum bisa diakomodir karena ya begitulah banyak sekali usulan to yang diberikan juga dari kelurahan lain, jadi diseleksi lagi mana kebutuhan yang anggarannya juga cukup itu yang dilaksanakan. Tapi semua usulan yang belum bisa diakomodir, itu akan jadi bahan pembahasan pada perencanaan pembangunan selanjutnya.” (Hasil wawancara peneliti dengan IW pada tanggal 25 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terkait dengan usulan yang diakomodir ke tingkat kecamatan beragam. Ada yang dapat menerima jika usulan belum terpenuhi, namun ada juga masyarakat yang tidak bisa menerima karena usulannya belum terpenuhi di tingkat kecamatan. Penyebab usulan masyarakat belum terakomodir disebabkan karena banyaknya usulan yang masuk dari Kelurahan atau Desa lain dan

juga dilakukan seleksi terhadap usulan yang diajukan. Tapi, jika ada usulan yang belum sempat diakomodir akan jadi bahan pembahasan pada perencanaan pembangunan selanjutnya.

Kutipan wawancara di atas didukung dengan pernyataan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang yang mengatakan bahwa:

“Kalau usulan di tingkat kecamatan itu dek biasa banyak usulan yang tidak terakomodir di sana, karena di tingkat kecamatan itu kan banyak sekali usulan-usulan yang masuk dari Desa atau Kelurahan lain, dan nanti juga diseleksi untuk disesuaikan dengan prioritas usulan dari SKPD. Kayak kemarin yang disetujui itu cuman satu padahal ada beberapa usulan yang diajukan, terus yang disetujui hanya pembangunan jalan tani. Jadi banyak usulan-usulan masyarakat yang belum diakomodir di tingkat Kecamatan.” (Hasil wawancara peneliti dengan TN pada tanggal 07 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seringkali pada tingkat kecamatan usulan-usulan masyarakat tidak terakomodir karena di tingkat Kecamatan banyak usulan-usulan yang masuk dari desa atau kelurahan-kelurahan lain dan usulan-usulan yang telah masuk itu akan diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan prioritas usulan dari SKPD terkait. Sehingga pada prosesnya banyak usulan-usulan masyarakat yang belum diakomodir di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2021, hanya satu usulan masyarakat dari Kelurahan Mario Pulana yang dapat diakomodir yaitu pembangunan jalan tani.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kelurahan Mario Pulana yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu pantau itu semua usulan yang diakomodir ke Kecamatan, nanti kalau sudah ada keputusan dari sana kita akan dapat informasi dari kelurahan. Sejauh ini rata-rata usulan itu disepakati ada beberapa yang belum diakomodir itu karena dananya yang tidak cukup.” (Hasil wawancara peneliti dengan HK pada tanggal 22 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan pemantauan terhadap usulan yang diakomodir ke tingkat Kecamatan dan jika sudah ada keputusan maka Kelurahan akan menginformasikan mana usulan yang telah diakomodir.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu memberikan tanggapan yang baik, karena mereka yang hadir dalam Musrenbang itu sudah mengerti bagaimana mekanismenya ini usulan setelah diajukan ke tingkat Kecamatan. Usulan yang diakomodir sampai tingkat Kecamatan itu nanti kalau sudah ada keputusannya akan diinformasikan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan SS pada tanggal 03 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu memberikan tanggapan yang baik terhadap apapun usulan yang terpilih di tingkat Kecamatan. Karena masyarakat yang hadir pada saat Musrenbang Kelurahan telah mengetahui bagaimana mekanisme usulan yang diajukan ke tingkat kecamatan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Konsep pembangunan partisipatif identik dengan kekuatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat. Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti

masalah dan kebutuhan, serta dapat mengembangkan wilayahnya sendiri. Mereka akan menggunakan dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerah mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, semua program perencanaan harus melibatkan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, peneliti menggunakan 3 proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Suwandi (2012) yaitu terfokus kepada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dan sinergitas.

1. Terfokus Kepada Kepentingan Masyarakat

Salah satu proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi akan meningkatkan kemandirian dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Terfokus pada kepentingan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan, sehingga didapatkan daftar masalah, meliputi:

a. Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat

Identifikasi masalah merupakan proses untuk menemukan, mengetahui dan mengumpulkan isu-isu atau persoalan yang dihadapi atau berkembang di masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat menjadi faktor kunci karena mereka lah yang sebenarnya mengetahui

apa permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, proses identifikasi masalah merupakan proses yang mengajak masyarakat untuk secara cermat mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi.

Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat yaitu proses yang dilakukan aparat Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba dalam mengetahui, mengumpulkan dan merumuskan permasalahan atau kebutuhan yang dihadapi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti, untuk mendapatkan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros melakukan proses identifikasi masalah dengan mengadakan Musrenbang dan Rapat Koordinasi.

Musrenbang diselenggarakan oleh pihak pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, sedangkan Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Kepala Lingkungan namun tetap berada dalam pengawasan Kelurahan dan kegiatan ini dilakukan sekali setahun karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan. Kegiatan identifikasi dimulai dari rapat koordinasi disetiap Lingkungan Kelurahan Mario Pulana, dengan mekanisme menghadirkan masyarakat untuk menggali, menemukan dan mengumpulkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh yang kemudian diseleksi untuk dipilih mana masalah yang akan diajukan ke Musrenbang Kelurahan.

Selanjutnya mekanisme identifikasi masalah Musrenbang Kelurahan hampir sama dengan rapat koordinasi namun usulan yang disepakati akan diajukan ke tingkat kecamatan. Berikut dapat dilihat proses identifikasi masalah Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros pada gambar di bawah berikut ini:



Gambar 4.3: Proses identifikasi Masalah Musrenbang di Kelurahan Mario Pulana

Sebelum penyeleksian kebutuhan dan masalah, terlebih dahulu dilakukan *review* terhadap kebutuhan dan masalah yang diusulkan oleh masyarakat, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Semua usulan yang diajukan akan dikumpulkan melalui daftar masalah dan setiap usulan akan diberikan nomor atau ranking berdasarkan skala prioritas usulan yang diajukan.

Identifikasi masalah yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros melalui kegiatan Musrenbang dan Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi semua permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diagendakan kebutuhan-kebutuhan yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ivanna (2018) bahwa pengidentifikasian masalah dilakukan untuk mengetahui dan menemukan apa saja permasalahan yang dapat rumuskan ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat melalui serangkaian forum musyawarah. Karena dalam hal perencanaan pembangunan banyak sekali yang perlu dibangun, maka dari itu dilakukan proses identifikasi masalah agar pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat terancang hingga pelaksanaan pembangunannya tercapai tepat sasaran.

Namun terdapat permasalahan yang terjadi saat proses identifikasi masalah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros yaitu kegiatan rapat koordinasi yang menjadi sarana untuk melakukan identifikasi masalah kebutuhan masyarakat jarang diadakan oleh Kepala Lingkungan. Dan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan sehingga menjadi penghambat masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.

b. Terakomodasinya Kebutuhan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Musrenbang Kelurahan

Untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam

Musrenbang bukanlah suatu hal yang mudah. Dengan beragam usulan atau aspirasi yang diberikan masyarakat menjadi suatu tantangan yang harus diputuskan oleh pemerintah dalam memutuskan daftar usulan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dengan terakomodasinya semua kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentunya akan berdampak baik untuk keberlangsungan pembangunan yang akan dilakukan, namun terkadang banyak hal yang membuat sulitnya mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat. Terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan yaitu kebutuhan masyarakat dapat ditampung atau diterima dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam pengambilan keputusan Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, semua kebutuhan aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dengan baik dan semua usulan yang disampaikan bukan hanya sekedar keinginan tetapi memang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Saat proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan kebutuhan masyarakat ditampung dan didengarkan oleh pihak penyelenggara yaitu aparat pemerintah Kelurahan Mario Pulana, sehingga dalam pengambilan keputusan terjadi kesesuaian antara kebutuhan masyarakat yang diaspirasikan melalui usulan dengan

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu daftar usulan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Tahun 2021, terdapat 8 usulan pembangunan fisik hasil musrenbang dan 2 pembangunan non-fisik hasil musrenbang yang terpenuhi dalam Musrenbang Kelurahan.

Semua proses saat Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan terbuka kepada masyarakat dan semua usulan diberikan solusi agar dapat terakomodir dengan baik. Hal ini perlu dilakukan agar semua proses pelaksanaan bisa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam segala tahapan Musrenbang sehingga usulan yang menjadi daftar program kegiatan memang benar berdasarkan pada masalah yang dihadapi masyarakat.

Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terjadi sekarang di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros mengalami perubahan karena pandemi *Covid-19*. Pelaksanaan perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbang dan Rapat Koordinasi dilakukan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* untuk mencegah penularan Virus *Covid-19*. Pemerintah juga harus menyesuaikan program untuk mengakomodir kehidupan *new normal* dalam ancaman *Covid-19*.

2. Partisipatoris

Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan adalah hal yang harus dilakukan. Setiap masyarakat melalui forum pertemuan harus memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pikiran, tenaga ataupun materil tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, tempat dan waktu yang meliputi:

a. Keterlibatan Pada Setiap Tahapan Perencanaan Pembangunan

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan mempunyai dampak yang sangat tinggi terkait dengan berhasilnya perencanaan pembangunan yang dilakukan. Dengan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka semakin mudah pula untuk menentukan program rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dalam setiap Musrenbang, masyarakat harus dilibatkan pada setiap tahapan yang ada karena masyarakat mempunyai hak untuk terlibat langsung dalam setiap proses tahapan Musrenbang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros, pasal 8 huruf g bahwa merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Keterlibatan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan yaitu aparat pemerintah mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat juga melibatkan diri dengan mengambil bagian pada setiap tahapan

Musrenbang mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan tahapan pasca pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Pada proses Musrenbang di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, masyarakat sudah dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan melalui undangan yang diberikan oleh pihak penyelenggara Musrenbang. Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros juga sudah aktif mengikuti setiap proses tahapan, dengan sangat antusias memberikan aspirasinya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros juga sudah paham bagaimana alur dari tahapan Musrenbang sehingga semua dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat memiliki posisi sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Keterlibatan masyarakat pada setiap proses perencanaan pembangunan juga akan menimbulkan sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, karena masyarakat akan menganggap bahwa mereka dipedulikan dan aspirasinya didengarkan oleh pemerintah. Pentingnya partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga akan menimbulkan dukungan dan penerimaan

masyarakat, sehingga terwujudnya transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Mario Pulana dari berbagai komponen seperti dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat itu sendiri selama proses berlangsung dari awal sampai akhir pada Musrenbang, secara otomatis masyarakat Kelurahan Mario Pulana akan selalu lebih serius dalam memperhatikan dan mengangkat permasalahan yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Mario Pulana itu sendiri.

Namun yang menjadi kendala adalah kehadiran masyarakat yang masih sedikit sehingga menyulitkan pemerintah dalam mencari tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan peneliti mengenai daftar kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang hanya 9 (sembilan) masyarakat yang hadir dalam Musrenbang yang, dalam hal ini kehadiran masyarakat masih dibutuhkan, sebab merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Maryam & Dewi (2013) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan karena dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan, masyarakat yang mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi dan masyarakat pula yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau

tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan maka segala program perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Kurangnya partisipasi dari masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam perencanaan pembangunan, masyarakat berasumsi kalau proses pengambilan keputusan saat musyawarah ialah tugas pemerintah bukan tugas masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu banyak ikut campur dalam musyawarah tersebut. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu rata-rata mata pencarian masyarakat Kelurahan Mario Pulana sebagai petani yang membuat mereka tidak sempat ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan.

b. Pemberian Usulan/ide/saran dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Pemberian usulan, ide atau saran yang diberikan masyarakat dalam Musrenbang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mutlak dilakukan untuk tercapainya tujuan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. terutama di zaman reformasi saat ini, di mana masyarakat turut andil dalam kegiatan perencanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan atau ide dalam Musrenbang dengan mengajukan usulan terkait dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat. partisipasi

dengan memberikan usulan atau ide mempunyai tujuan untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program usulan dan juga untuk mewujudkan pengalaman dan pengetahuan agar dapat mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Pemberian usulan/ide/saran dalam perencanaan pembangunan yaitu bentuk pemberian usulan atau ide dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya perencanaan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

Pemberian usulan atau ide dari masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba sangat beragam, mulai dari usulan tentang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Usulan pembangunan fisik umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, sedangkan usulan pembangunan non fisik umumnya merupakan jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu daftar usulan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Tahun 2021, terdapat 8 usulan pembangunan fisik hasil musrenbang dan 2 pembangunan non-fisik hasil musrenbang. Walaupun tidak terlibat langsung dalam Musrenbang yang dilakukan di Kantor Lurah, akan tetapi sebagian masyarakat tetap berusaha untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan atau pendapat yang disampaikan kepada Kepala Lingkungan yang nantinya akan menyampaikan pendapat masyarakat di forum rapat atau musyawarah.

c. Pemberian Bantuan Tenaga/Material lain dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Pemberian bantuan berupa tenaga atau material dalam kegiatan perencanaan pembangunan yaitu partisipasi yang diberikan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan untuk terlaksananya pembangunan, yang biasanya berupa uang ataupun pertolongan untuk orang lain. Pemberian bantuan tenaga atau material merupakan jenis partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan seluruh tenaga dan sumbangan materi yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Menurut Laksana (2013) partisipasi tenaga yang diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa pertolongan dalam bentuk tenaga kepada orang lain guna mencapai program yang diinginkan. Sedangkan partisipasi materi yang diberikan dalam perencanaan pembangunan berupa uang serta makanan diberikan kepada orang lain. Dengan adanya bantuan tenaga atau materi diharapkan masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros selalu membantu pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memberikan bantuan tenaga atau materi yang berupa menghibahkan tanah milik masyarakat untuk membangun jalan tani, sumbangan uang untuk pembangunan mushollah dan saat ada

kegiatan Musrenbang Tokoh Masyarakat membantu untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang. Masyarakat ikut melakukan pemberian tenaga atau meteril dengan kesadaran mereka sendiri demi membangun Kelurahan Mario Pulana lebih baik dan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

3. Sinergitas

Sinergitas yaitu terjadinya kesatuan tindakan dari setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam setiap kegiatan Musrenbang yang meliputi:

a. Kesepakatan antar Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Mengingat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat bukanlah hal yang mudah, banyak pertimbangan dan proses dilakukan sehingga berakhir dengan pengambilan keputusan yang dilakukan bersama-sama dalam Musrenbang. Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yaitu bentuk kesepakatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam memutuskan alternatif permasalahan berdasarkan pertimbangan bersama.

Kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas yakni kegiatan prioritas untuk kelurahan sendiri yang dibiayai dari dan kelurahan atau alakosi dana masyarakat dan kegiatan priotitas yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang biayanya itu dari APBD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada usulan yang belum diakomodir di tingkat kecamatan, jadi usulan yang dijadikan kegiatan untuk kelurahan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan dan alakosi dana masyarakat. Selain menyepakati dua kegiatan, pemerintah dan masyarakat Kelurahan Marion Pulana juga melakukan kesepakatan mengenai anggaran setiap kegiatan yang diusulkan.

Kesepakatan yang terjadi dalam Musrenbang Kelurahan Mario Pulana juga untuk menentukan tim delagasi yang terdiri dari 2-3 orang perwakilan masyarakat dan 3 orang dari aparat kelurahan untuk mewakili hadir pada saat Musrenbang Kecamatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Sigalingging (2014) bahwa kesepakatan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang disepakati juga pembagian tanggungjawab mulai dari tahapan perencanaan, pengendalian keputusan dan penyusunan kebijakan sampai akhir. Setelah adanya kesepakatan, maka tidak dibenarkan adanya

perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak. Hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mario Pulana juga berdasarkan kerjasama semua pihak agar menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat terkait keputusan yang disepakati.

b. Usulan masyarakat dalam Musrenbang Diakomodir sampai Tingkat Kecamatan

Sinergitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dari proses usulan masyarakat dalam keputusan Musrenbang Kelurahan diakomodir sampai tahap Musrenbang Kelurahan, namun tentunya harus selalu menekankan kerjasama, serta interaksi diantara *stakeholders*. Terkadang forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas pada musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, representasi masyarakat dalam forum-forum di tingkat kecamatan sangat kecil, ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. Usulan masyarakat dalam Musrenbang diakomodir sampai tingkat Kecamatan yaitu terkomodirnya semua usulan masyarakat yang diajukan ke tingkat Kecamatan dan respon yang diberikan masyarakat terkait usulan yang dapat terakomodir maupun tidak terakomodir di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, usulan program yang telah disepakati bersama dalam Musrenbang Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba, masih banyak yang

belum diakomodir di tingkat kecamatan, disebabkan di tingkat Kecamatan banyak usulan-usulan yang masuk dari Desa atau Kelurahan-Kelurahan lain dan usulan-usulan yang telah masuk itu akan diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan prioritas usulan dari SKPD terkait. Hanya satu usulan dari Kelurahan Mario Pulana yang dapat diakomodir yaitu pembangunan jalan tani.

Setiap usulan yang diajukan ke tingkat kecamatan akan diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan dan jika ada usulan yang belum diakomodir, maka akan direncanakan untuk bahan pembahasan pada perencanaan pembangunan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat, bahwa proses identifikasi masalah di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Cempa Kabupaten Maros yaitu kegiatan rapat koordinasi belum berjalan dengan efektif, karena kegiatan sering tidak dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan. Tetapi semua aspirasi masyarakat dapat ditampung dan didengarkan melalui kegiatan Musrenbang Kelurahan.
2. Partisipatoris, bahwa masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif serta bantuan tenaga/materil yang diberikan masyarakat bersifat sukarela. Tetapi masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan hanya sedikit, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
3. Sinergitas, bahwa kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan sudah cukup efektif dan efisien dengan melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas, menyepakati tim delegasi dan anggaran setiap kegiatan yang diusulkan. Tetapi usulan yang diajukan ke tingkat

Kecamatan belum bisa terkamodir sepenuhnya karena banyaknya usulan dari Kelurahan atau desa lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros perlu lebih memperhatikan dan berkoordinasi kepada semua Kepala Lingkungan agar kegiatan yang dilaksanakan seperti Musrenbang dan Rapat Koordinasi bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga dapat memudahkan untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Bagi masyarakat Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros agar lebih meningkatkan keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan seperti pada saat kegiatan Musrenbang dan Rapat Koordinasi yang diadakan Pemerintah setempat, karena dengan keterlibatan masyarakat akan lebih memudahkan untuk menentukan dan memutuskan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.
3. Pemerintah Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dan masyarakat perlu meningkatkan kerjasama untuk melaksanakan perencanaan pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Asroha, H. (2010). *Perencanaan Pembelajaran*. Surabaya: Kopertis IV-Pemprov Jatim.
- Digdownseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dolong, J. (2016). Sudut Pandang Perencanaan Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol 5(1).
- Gunena, N. (2013). Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe. *Jurnal Governance*, Vol 5(1).
- Handoko, H. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harjo, W. D. (2017). Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Gutan Rakyat di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 3(1).
- Hendra, N. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013). *Jurnal Jom Fisip*, 3(2).
- Ivanna, J. (2018). Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan Partisipatif. *Jurnal generasi kampus*, 11(1).
- Kartikawanto, I. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Dan Desa. *Jurnal ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 14(4).
- Karyoto. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN - Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3).
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol (1).
- Listyangish. (2014). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Majid, A. (2015). *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5).

Maryam, & Dewi. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Dan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 14.

Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).

Nadzir, M. (2013). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1(2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros.

Permatasari, A. (2017). Analisa Konsep Perencanaan Strategis. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol 9(2).

Prakoso, I. W., & Subowo, A. (2018). Proses Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Partisipatif Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 8(1).

Puspasari, A. A. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 3(1).

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17(3).

Sanjaya, W. (2013). *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sari, D. (2016). *Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Tpa Terjun Kecamatan Medan Marelan*. Skripsi Universitas Medan Area.

Seknun, Y. (2014). Telaah Kritis Terhadap Perencanaan Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol 17(1).

Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sigalingging, H. A. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2.
- Sudarmanto, E., & Revida, E. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Relika Aditama.
- Suwandi. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 1(2).
- Wrihatnolo, R., & Nugroho, R. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dalam Panduan*. Jakarta: Eleckx Media Komputindo.